

STRATEGI KEBIJAKAN INVESTASI

PADA ERA OTONOMI DAERAH DALAM MENDUKUNG SEKTOR PERDAGANGAN



Rumusan Masalah

- apa kendala yang dihadapi terkait kebijakan investasi di era otonomi daerah dalam mendukung sektor perdagangan?
- bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap sektor perdagangan melalui investasi?

Tujuan Penelitian

- mengetahui kendala yang dihadapi terkait kebijakan investasi di era otonomi daerah dalam mendukung sektor perdagangan
- mengetahui bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap sektor perdagangan melalui investasi

Manfaat Penelitian

- pengembangan ilmu ekonomi dan kebijakan publik, khususnya mengenai investasi & perdagangan
- membantu DPR dalam pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berkaitan dengan investasi & perdagangan

Unit Analisis

pelaku yang menjalankan program & kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan investasi dalam mendukung sektor perdagangan, antara lain: Bappeda, Disperindag, DPMPTSP

Teknik Sampling

purposive sampling

Desain Penelitian

penelitian deskriptif dengan pendekatan KUALITATIF

Instrumen Pengumpulan Data

wawancara & studi kepustakaan

Teknik Analisis Data

- reduksi data
- penyajian data
- conclusion drawing (penarikan kesimpulan & verifikasi)



Hasil Penelitian

terjadi PERUBAHAN PROSEDUR & TATA CARA pemberian persetujuan, fasilitas, dan perizinan pelaksanaan penanaman modal dari BKPM kepada Kepala Daerah Provinsi (Gubernur).

PERMASALAHAN yang menghambat laju investasi:



Rekomendasi Penelitian



MENYUSUN REGULASI yang meningkatkan kenyamanan berinvestasi



PERCEPATAN FASILITAS investasi



peningkatan **KELAYAKAN** hak tenaga kerja dan penyelesaian konflik **KETENAGAKERJAAN**



PERSIAPAN LAHAN bebas sengketa



perluasan **KESEMPOATAN KERJA** yang layak



PENGENDALIAN HARGA untuk menekan inflasi

STRATEGI PENINGKATAN INVESTASI

JANGKA PENDEK

menentukan skala prioritas investasi nasional.

mendorong investasi pada bidang usaha sumber daya domestik, berskala ekspor, padat karya, layanan administrasi, & layanan bisnis yang efisien.

peningkatan kualitas SDM.

peningkatan koordinasi lintas sektoral.

JANGKA MENENGAH

penetapan tahapan prioritas investasi berdasarkan kondisi daerah & institusi.

mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.

JANGKA PANJANG

memuat kebijakan investasi dengan pengembangan industri berbasis teknologi & pengetahuan secara bertahap.

